

[Click here and write your Article Category](#)

Peningkatan Pelayanan Disiplin Aparatur Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Teknologi Informasi

Amir Mahmud Husein¹, Yennimar², Delima Sitanggang³, Yonata Laila⁴

^{1,2} Universitas Prima Indonesia, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika

^{3,4} Universitas Prima Indonesia, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Sistem Informasi

ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Disiplin, SIABDI, PNS, BKD Padang Lawas Utara

CORRESPONDENCE

Phone: +62 (0751) 12345678
E-mail: first_author@affiliation.xx.xx

ABSTRACT

Masalah kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan organisasi pemerintah. Seorang PNS (pegawai negeri sipil) tidak akan bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya apabila kurang disiplin terhadap aturan-aturan yang berlaku. Untuk membantu pemerintah khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menjalankan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer (FTIK) UNPRI terpanggil untuk turut menanggulangi masalah disiplin PNS tersebut yang terfokus pada penerapan teknologi informasi dengan membangun sistem informasi absensi digital (SIABDI) melalui pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan PNS perwakilan dari tiap-tiap Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk diberikan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem, selain itu Tim PKM juga membantu membangun jaringan LAN di setiap SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan di BKD Kabupaten Padang Lawas Utara selama 8 bulan kemudian dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem sesuai kebijakan yang berlaku. Dari hasil evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan, target akhir kegiatan ini telah memberikan kemudahan bagi BKD melakukan pengawasan dan penerapan hukuman disiplin, selain itu pimpinan daerah dapat menggunakan sistem ini untuk memonitoring kedisiplinan PNS melalui device mobile. Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, mengikuti aktivitas pelaksanaan penelitian tindakan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi.

INTRODUCTION

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan, penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah.

e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-Government. Lebih jauh lagi, e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan didalamnya mempunyai kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan data kepegawaian untuk disajikan dalam bentuk aneka informasi data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Berdasarkan data PNS tahun 2017 berjumlah 3.916 orang dengan Fungsional Umum 1.131, Pendidikan 1.726, Tenaga

Kesehatan 465, Struktural 523, Penyuluh 18, Inspektorat 6, Pengawas 45. Untuk tingkat golongan I berjumlah 102, 944 pegawai golongan II, 2.600 golongan III dan 798 pegawai dengan golongan IV, sedangkan pegawai jenis kelamin Laki-laki 1.604 orang, 2.3012 jenis kelamin perempuan, memiliki 29 Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD), 12 kecamatan, 4 kelurahan, 21 Puskesmas, 1 Rumah Sakit, 208 Sekolah Dasar dan 52 tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Dengan jumlah PNS yang begitu besar sudah seharusnya BKD memiliki database PNS yang terpusat, dimana permasalahan manajemen data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan fungsi administrasi teknis kepegawaian yang beraneka ragam baik yang dikerjakan secara reguler (rutin dari waktu ke waktu) seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan CPNS dan PNS serta kegiatan administrasi non rutin lainnya seperti mutasi dan promosi jabatan masih berjalan di masing-masing bidang, sehingga data PNS tidak akurat. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 48 bahwa mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, oleh karena amanat tersebut dipandang perlu untuk selalu mengembangkan sistem informasi kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan tentang informasi kepegawaian.

METHOD

Sehubungan dengan permasalahan mitra yang dikemukakan, solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun Sistem Informasi Absensi Digital (SIABDI) yang terintegrasi dengan mesin sidik jari jadi setiap SKPD sehingga dapat menarik/sinkronisasi data absensi PNS setiap hari ke Server BKD, selain itu tim PKM juga akan melakukan pemasangan dan instalasi Jaringan LAN sesuai kebutuhan sistem, melakukan instalasi aplikasi pada komputer tiap-tiap SKPD serta memastikan aplikasi dapat terhubung ke mesin sidik jari. Selain dari pada itu sistem yang dikembangkan akan diintegrasikan dengan data perjalanan dinas PNS dimana setiap PNS yang akan melakukan perjalanan dinas akan mengirimkan file SK dalam bentuk PDF ke aplikasi..

Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, mengikuti aktivitas pelaksanaan penelitian tindakan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi. Prosedur kerja untuk mendukung metode penyelesaian masalah adalah dengan cara pelaksanaan 30% teori dan 70% praktik. Oleh karena waktu pelaksanaan yang hanya 8 bulan, maka diharapkan setelah kegiatan pengabdian ini selesai. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian seperti gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Metode Pelaksanaan

Berikut penjelasan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:

1. Kegiatan Persiapan:
 - a) Melakukan koordinasi dengan LPPM UNPRI Kota Medan Sumatera Utara.
 - b) Sosialisasi kegiatan pengabdian kepada Instansi mitra dengan mendatangi Badan Kepala Badan, Kepala Bidang Pengembangan dan Kepala Sub Bidang Disiplin BKD Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - c) Penyusunan program pengabdian berdasarkan hasil analisis situasi.
 - d) Pengumpulan data untuk keperluan pembuatan Sistem Informasi.
 - e) Membuat jadwal kegiatan program pengabdian.
2. Pelaksanaan Tindakan:
 - a) Pembentukan dan pendampingan tim penguji Sistem Informasi dari pihak BKD Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - b) Pembangunan instalasi dan Pemasangan Jaringan untuk kebutuhan Sistem setiap SKPD serta melakukan instalasi aplikasi pada komputer;
 - c) Sosialisasi dan Pelatihan penggunaan sistem dengan Tim verifikasi absensi PNS dan perwakilan sebagai operator setiap SKPD.
 - d) Pelatihan dan pendampingan dengan TIM Sistem Informasi BKD Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Pendampingan
Dalam kegiatan ini tim PKM melakukan pendampingan dalam penerapan aplikasi untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai kondisi seperti pendampingan penarikan data absensi ke mesin sidik jari, pengiriman data ke server BKD, pengiriman data surat perjalanan dinas dan pembuatan laporan rekapitulasi absensi tiap hari maupun tiap bulan dan pemasukan data sesuai data aktual oleh operator.
4. Observasi dan Evaluasi
Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa hasil implementasi sistem dengan melakukan pengujian secara langsung dengan proses yang berjalan selama ini, Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan, kendala maupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
5. Refleksi
Refleksi dilakukan bersama antara tim, staff dan mitra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seluruh proses pelaksanaan kegiatan

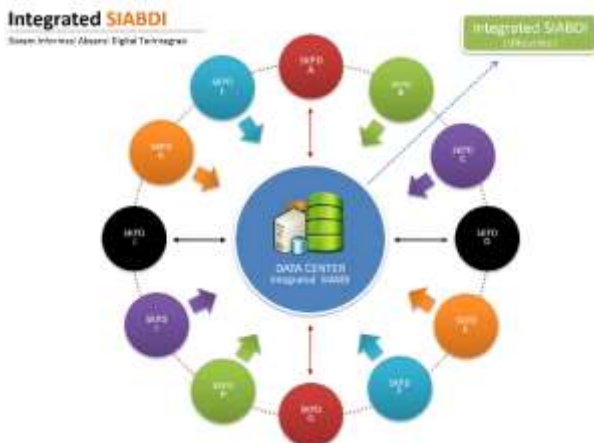
RESULTS AND DISCUSSION

Dalam kegiatan peengabdian masyarakat dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2020 di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

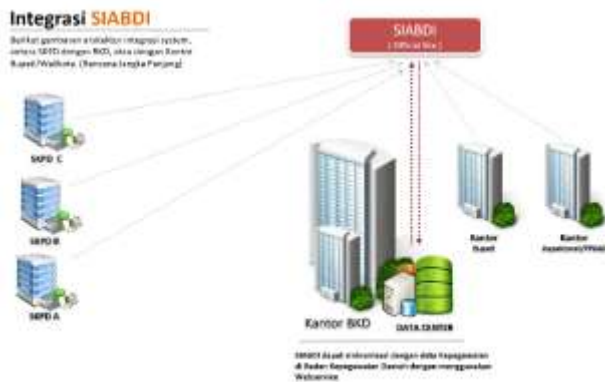
Padang Lawas Utara. Berikut ini diuraikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

a) Sosialisasi

Dalam kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis penerapan disiplin Aparatur di Lingkungan BKD Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam kegiatan ini tim pengabdian memberikan materi kepada peserta dari beberapa Satuan Kerja yang di Undang secara resmi oleh pihak mitra. Berikut ini beberapa hasil materi yang di sampaikan oleh nara sumber dalam kegiatan ini.



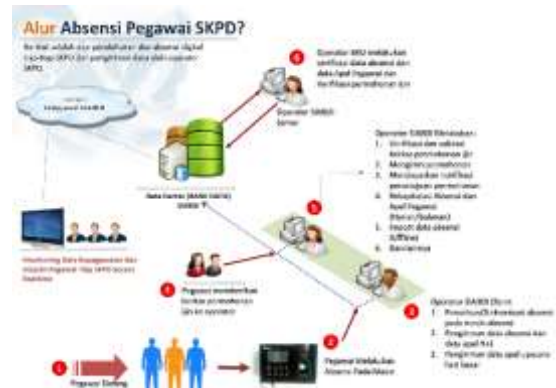
Gambar 2 Integritas Aplikasi



Gambar 3 Integrasi dengan Satuan Kerja



Gambar 4 Alur Pengumpulan Data



Gambar 5 Alur Absensi Digital



Gambar 6. Topologi Jaringan Online



Gambar 7. Topologi Jaringan Offline



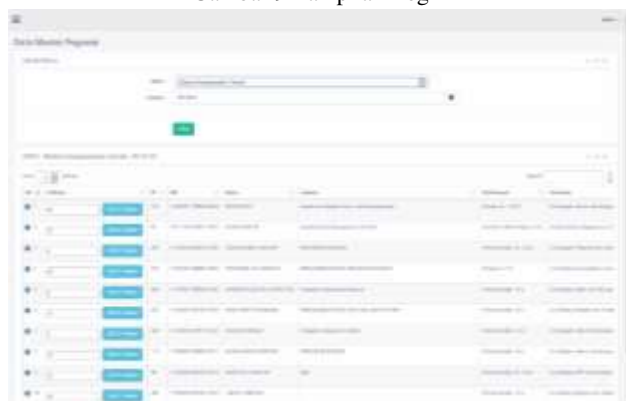
Gambar 8 Target Akhir Sistem

b) Pelatihan dan Pendampingan Aplikasi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim melakukan pendampingan kepada operator dalam menggunakan sistem. Beberapa tampilan aplikasi disajikan sebagai berikut:



Gambar 9 Tampilan Login



Gambar 10 Data Pegawai



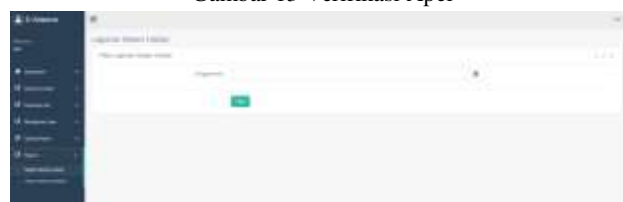
Gambar 11 Verifikasi Izin



Gambar 12 Penambahan Izin



Gambar 13 Verifikasi Apel



Gambar 14 Laporan Absensi

CONCLUSIONS

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Disiplin Aparatur Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Teknologi Informasi, maka target akhir yang diharapkan adalah mitra menghasilkan database yang terintegrasi dengan mesin absensi sehingga memudahkan dalam pengawasan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menerapkan teknologi informasi, selain itu juga dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi operator yang di kirim dari beberapa satuan kerja sehingga aplikasi dapat diterapkan di masing-masing skpd.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasi disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berserta jajarannya yang telah mempersiapkan tempat dan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENCES

- [1] Moonti, Roy M, Polidu, Irwan, 2018, Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, *Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1 April 2018.
- [2] Alfinita. S, Rivani. 2012. Analisis Job Description pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- [3] Haydah. Titin, Nur. 2012. Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal*
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- [5] Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- [7] Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, *Buku Kepegawaian Tahun 2017*.
- [8] Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.